

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous*, 2012. *Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah* (online). pajak.go.id. Diakses pada 19 November 2013.
- Anonimous*. 2012. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan* (Online). id.wikipedia.org. Diakses pada 17 Februari 2013
- Anonimous*. 2012. *Objek dan Subjek Pajak* (Online). www.pajakonline.com. Diakses pada 17 Februari 2013
- Anonimous*. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi* (Online). id.wikipedia.org. Diakses pada 17 Februari 2013
- Anonimous*. *Pendapatan Asli Daerah* (Online). www.negarahukum.com. Diakses pada 19 Februari 2013
- Andrea, Monza, 2012, Permasalahan-permasalahan yang Terkait dengan Penarikan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Untuk Bekas Tanah Adat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, *Skripsi* (Tidak Diterbitkan), Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Bambang Pamulardi, 1995, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BPHTB Menjadi Pajak Daerah*. Jakarta: Kemenkeu.
- Deddy K, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah; Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*, Makalah, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BPHTB Menjadi Pajak Daerah*. Jakarta: Kemenkeu.

- Erlangga Agustino Landiyanto, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah; Studi Kasus Kota Surabaya*, Cures Working Paper 05/01, Januari 2005
- Handayani, Swandari.2007. ”*Pelaksanaan Self Assessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Boyolali*”.Tesis.Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Hasil Rapat Koordinasi Inspektorat, BPKD, BPKD, DPP, Bappeda dan Diskominfomas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 02 Oktober 2013
- Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah dengan tema “*Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*”, Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*,Ed.1.Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Pamuji, Kadar. *Implikasi Kebijakan “Pendaerahan” Pengelolaan PBB Setelah Berlakunya UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Online). Fh.unsoed.ac.id. Diakses pada 17 Februari 2013.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Dan BangunanKe rekening Kas Umum Daerah.
- Shabr Cheema, C. & A. Rondinelli, Dennis, 2006., Ratnawati. <http://nasirforkombia.wordpress.com/2008/12/16/devolusi-konsep-desentralisasi-demokratis-bymnasir-sip-mpa/> (diakses tanggal 1 Desember 2013)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Wikipedia. Devolusi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Devolusi> (diakses tanggal 1 Desember 2013)